

(tuntutan negara tetangga, atau imperialisme dari negara adikuasa), atau suatu kondisi yang timbul dari kombinasi faktor eksternal maupun internal (seperti jaringan lintas negara yang memiliki pengaruh dan dampak di dalam maupun luar negeri).

Dimensi kedua: pendekatan geopolitik bersifat multi-kausal. Sebuah analisis atas suatu negara maupun sebuah wilayah geografis tidak dapat direduksi hanya pada satu faktor belaka: tidak pernah terjadi suatu masalah muncul hanya disebabkan murni oleh faktor etnis ataupun agama.<sup>95</sup>

Dimensi ketiga: Pendekatan geopolitik yang ditawarkan oleh Chauprade pada dasarnya bersifat kulturalis (memperhatikan faktor kebudayaan/identitas). Itu berarti pendekatan ini menekankan pentingnya faktor budaya dalam mempengaruhi sejarah dan juga fakta bahwa banyak identitas nasional yang pada awalnya merupakan budaya nasional.

Fenomena serangan Amerika Serikat terhadap Afghanistan ini melibatkan ketiga dimensi tersebut. Pertama, karena fenomena ini dijalankan oleh sebuah negara terhadap negara lain. Kedua, karena penyebab permasalahan ini dapat dilihat adalah lebih dari satu alasan, antara lain meliputi alasan ekonomi-politik dan identitas. Sementara ketiga, fenomena ini digerakkan pula oleh faktor budaya yang merupakan turunan dari faktor identitas.

Dari dua penjabaran sebelumnya terlihat bahwa masing-masing pandangan *mainstream* memiliki kekurangannya sendiri yang menyebabkan masing-masing tidak mampu menjelaskan fenomena ini secara komprehensif. Karenanya, diperlukan suatu pendekatan alternatif yang dapat secara eklektik merangkum bagian-bagian yang akurat dari kedua pandangan sebelumnya.

Karena perspektif geopolitik kulturalis mengandung kedua unsur yang sebelumnya telah dibahas, dan yang membedakannya adalah skala keduanya (dengan kata lain, tidak menegasikan salah satunya), serta penekanannya terhadap signifikansi faktor kultural, maka di sini penulis akan hanya akan menambahkan sudut pandang

---

<sup>95</sup> Ia mengajukan contoh konflik Maluku yang beberapa tahun lalu seringkali diinterpretasikan di Barat sebagai sebuah konflik agama murni, yakni Kristen melawan Islam. Sebuah analisis ilmiah yang muncul kemudian, bertentangan dengan analisis pertama, memperlihatkan bahwa sesungguhnya konflik tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, dan memperlihatkan kompleksitas dari berbagai perpecahan: perpecahan antara pusat dan periferi, perpecahan antara Muslim dan Kristen, perpecahan antara golongan keagamaan moderan dan ekstrimis, kaum elit tradisional dan modern, separatistis dan pendukung kesatuan, etnis Maluku dan non-Maluku, dan sebagainya.

dalam faktor kultur yang membedakannya dengan penjelasan deterministik (Huntington dkk.). Sementara itu dari sisi faktor ekonomi, penulis menganggap bahwa penjelasan dalam sub-bab faktor ekonomi di atas telah mencukupi, hanya saja tidak perlu dijadikan sebagai faktor determinan sebagaimana yang terjadi pada elaborasi sebelumnya. Dengan kata lain, dalam perspektif geopolitik kulturalis ini penulis bermaksud menambahkan penjelasan faktor ekonomi-politik yang sama, dengan penjelasan faktor kultural yang sedikit dimodifikasi. Modifikasi yang dimaksud hanyalah pada skala signifikansi faktor kultural tersebut mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Afghanistan.

Identitas kultural telah menjadi sorotan dalam studi politik dunia pasca-Perang Dingin. Pertama, dampak kultur politik telah tampak semakin nyata sebagaimana diperlihatkan oleh literatur mengenai tesis perdamaian demokratis (*democratic peace*), yang menyatakan bahwa kultur politik suatu negara, baik demokrasi atau bukan, merupakan penentu utama atas kecenderungan negara tersebut untuk berperang. Pendukung dari pandangan ini meyakini bahwa suatu entitas demokrasi tidak akan/jarang berperang dengan demokrasi yang lain (Ray, 1995; Maoz 1997) atau demokrasi lebih bersifat damai dibandingkan dengan non-demokrasi secara umum (Oneal & Ray 1997; Oneal & Russett 1997; Russett & Oneal 2001). Kedua, semakin banyak literatur mengenai politik internasional yang berfokus pada dampak identitas kultural yang secara lebih luas dipahami pula sebagai karakteristik religius maupun etnolinguistik (Chay, 1990; Mazrui, 1990; Ryan, 1990; Gurr, 1994; Carment and James, 1997). Seluruh tesis tersebut menyatakan bahwa persamaan keanggotaan peradaban adalah tulang punggung tempat bersandarnya politik internasional pasca-Perang Dingin.

Realisme kultural adalah turunan dari realisme yang berfokus pada faktor kultural sebagai determinan dari kebijakan luar negeri suatu negara, dan khususnya negara-negara yang berasal dari latar belakang kultural yang berbeda lebih mungkin terlibat dalam suatu konflik daripada negara-negara yang berasal dari latar belakang kultural yang sama. Konseptualisasi tersebut dapat dikontraskan dengan “idealisme kultural/*cultural idealism*, yang dalam pandangan instrumentalis politik internasional dinyatakan bahwa perbedaan kultural tidak berhubungan secara signifikan dengan

konflik, namun bahwa para pengambil kebijakan/pemimpin terkadang menggunakan atau menciptakan bias kultural di antara para pendukungnya untuk mencapai kepentingannya sendiri yang sempit (menggunakan perbedaan kultural sebagai instrumen) dan menciptakan konflik antara kelompok kultural yang berbeda (Henderson 1997).<sup>96</sup>

Pada celah inilah menurut penulis tesis Chauprade dapat diterapkan. Mengutip Marc-Aurele, ia meyakini bahwa “Sebagaimana dunia terdiri dari beragam unsur yang membentuk unsur lain yang lebih besar, begitu pula jalannya suatu takdir sejarah disebabkan oleh beragam kasus yang berkelindan menjadi satu.”<sup>97</sup>

### **III.1. Perspektif AS terhadap Islam dan Pengaruhnya pada Kebijakan Luar Negeri AS**

Sebelumnya, perlu diketahui bahwa Amerika Serikat yang dirujuk di atas mencakup masyarakat secara umum dan pemerintah secara khusus. Pandangan kedua segmen ini penting untuk dibahas karena pada titik tertentu, keduanya saling mempengaruhi dan membentuk karakter kebijakan luar negeri AS, sebagaimana mungkin pula terjadi pada negara-negara demokratis lainnya.

Steve Niva dalam artikelnya yang berjudul *Between Clash and Co-optation: US Foreign Policy and the Specter of Islam*: Secara de facto, terdapat sebuah pandangan populer mengenai Islam sebagai “Komunisme Baru”, dan bahaya ekstrim bagi peradaban Barat. Pandangan ini secara intens dipromosikan di AS oleh para “veteran” Perang Dingin yang mencoba mencari ancaman baru untuk menjustifikasi tindakan keamanan nasional dan juga kebijakan pro-Israel yang dipimpin oleh AIPAC, yang berkepentingan dengan nilai strategis Israel bagi AS. Para pendukung pandangan ini mencakup Daniel Pipes, editor jurnal Middle East, Peter Rodman, peneliti di Center for Strategic and International Studies, serta mantan anggota Dewan Nasional

---

<sup>96</sup> Errol A. Henderson. *Mistaken Identity: Testing the Clash of Civilizations Thesis in Light of Democratic Peace Claims*. (Pennsylvania: Pennsylvania State University, 2002), hlm. 4.

<sup>97</sup> Aymeric Chauprade, *Geopolitique: Constantes et changements dans l'histoire*, (Paris: Ellipses, 2007), hlm.i .

Reagan, kolumnis Charles Krauthammer, dan Bernard Lewis, profesor di departemen Timur Tengah Universitas Princeton.<sup>98</sup>

Salah satu contoh nyata dari perspektif terhadap Islamisme ini adalah program yang ditayangkan PBS yang berjudul “*Jihad in America*,” yang diproduksi oleh “ahli terorisme” Stephen Emerson, yang dikenal karena simpati pro-Israelnya, yang mengklaim bahwa sebuah gerakan “*Internationale Islam*” sedang berjalan dan mengarah pada suatu jaringan politik dan finansial sel teroris Islam di seluruh Amerika Serikat.<sup>99</sup>

Menurut Charles Krauthammer, “fundamentalisme Islam” amat berbahaya karena itu adalah “satu-satunya ideologi anti-Barat yang secara ekspresif menunjukkan niatnya untuk menghancurkan posisi, institusi dan budaya Barat, dimanapun memungkinkan.”<sup>100</sup>

Beberapa contoh di atas memperlihatkan bahwa Islam sebagai suatu subjek yang menjadi dasar pertimbangan baik di skala masyarakat maupun pemerintah memang benar-benar ada, meskipun dalam skala yang belum dapat dipastikan.

Selain itu, adalah menarik pula menyimak bagaimana masyarakat Barat memandang perspektif Islam terhadap mereka. Stephen Emerson misalnya menyatakan bahwa “kebencian para fundamentalis militan Islam terhadap Barat tidak terkait dengan suatu tindakan atau fenomena tertentu, namun kebencian itu semata-mata lebih bersumber pada keberadaan Barat itu sendiri, dalam bentuk sistem ekonomi, politik dan kultural yang dianggap sebagai suatu serangan intrinsik terhadap Islam.”<sup>101</sup> Golongan Islam yang menolak pandangan ini kemudian disebut sebagai “kaum Islamis moderat.” Lebih jauh lagi, mereka yang mengklaim bahwa Islam mampu untuk menciptakan reformasi sehingga dirinya dapat hidup serasi dengan demokrasi atau mereka yang memandang adanya kemungkinan akomodasi dalam skala tertentu dengan Barat dipandang sebagai “apologis Islamis”, atau “relativis.” Sementara beberapa pergerakan Islam bisa jadi berusaha memperoleh kekuasaan melalui cara-cara demokratis, begitu mereka berkuasa program yang akan dijalankan

---

<sup>98</sup> Steve Niva, *Between Clash and Co-optation: US Foreign Policy and the Specter of Islam, Middle East Report, No.208, Middle East Research and Information Project:1998*, hlm 4.

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

adalah melenyapkan demokrasi dan menggantikannya dengan teokrasi totaliter. Karenanya para pembuat kebijakan di AS didesak untuk mengkonfrontir negara-negara Islam gagal (*Islamic rogue states*) secara militer. Kebijakan yang sesuai untuk itu antara lain penindakan tegas atas tindakan terorisme, memblokade akses rezim Islamis terhadap senjata pemusnah massal, dan mencegah upaya penggulingan kekuasaan di suatu negara oleh kalangan Islamis.<sup>102</sup>

Menurut pandangan yang melihat Islam sebagai ancaman ini, AS harus memberikan dukungan penuh pada rezim-rezim yang terancam oleh kaum Islamis, bahkan seperti Aljazair dan Mesir, yang sekian lama memenjarakan dan menyiksa rakyat sipil tak bersalah.<sup>103</sup>

Skenario “ancaman Islam” mereproduksi kembali paradigma Perang Dingin mengenai adanya suatu blok dan ideologi yang bermusuhan, dan dengan demikian akan membantu mempertahankan model intervensi AS yang biasa terjadi di Dunia Ketiga yang amat disandarkan pada militerisasi. Mengkonfrontir “ancaman Islam” akan memberikan justifikasi terbaik untuk memelihara status quo rezim-rezim otoriter di Timur Tengah serta sekutu-sekutu yang melayani kepentingan “Perang Dingin” AS yakni untuk memastikan aliran minyak murah, menyediakan pangkalan militer bagi AS serta menjamin hegemoni militer Israel.<sup>104</sup>

Dalam sebuah survei nasional yang dilaksanakan selama dan segera setelah perang Afghanistan 2001, diusulkan tiga model opini publik global –kepentingan, sosialisasi dan pengaruh- dan didiskusikan pula validitas empiris masing-masing variabel tersebut. Variabel sosialisasi (seperti populasi Muslim dan insiden teroris yang pernah terjadi) cenderung memperlihatkan dampak yang signifikan. Kepentingan ekonomi yang sama, yang direpresentasikan dengan tingkat perdagangan, terbukti juga memiliki pengaruh positif. Variabel yang mengukur kepentingan keamanan yang berbenturan dan juga mengukur upaya AS untuk mempengaruhi opini masyarakat internasional memiliki dampak yang tidak signifikan atau lemah.<sup>105</sup>

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm 6.

<sup>104</sup> *Ibid.* hlm 7

<sup>105</sup> Benjamin E. Goldsmith, et al., American Foreign Policy and Global Opinion: Who Supported the War in Afghanistan? *The Journal of Conflict Resolution*, Vol.49, No.3 (Jun., 2005), Sage Publications, Inc. hlm.1.

Model yang kedua, yakni model sosialisasi, berfokus pada peran sosialisasi dari publik terhadap suatu persepsi tertentu – kepercayaan, nilai, dan ekspektasi terhadap politik. Sosialisasi tersebut muncul melalui pengalaman sejarah jangka pendek dan panjang, dan juga dari faktor sosial mendasar, seperti demokrasi, agama dan pembangunan ekonomi. Goldsmith meyakini bahwa faktor-faktor tersebut amat tepat dimasukkan ke dalam kategori general kultur politik. Duffield (1999) menyatakan bahwa kultur politik adalah kerangka yang paling berguna dalam memahami dampak dari faktor kultural dalam kebijakan luar negeri.<sup>106</sup>

Singkatnya, ketiga model tersebut terdiri dari: 1. kepentingan di level *state* membentuk opini publik di negara B berkaitan dengan kebijakan luar negeri negara A (model kepentingan), 2. kultur politik dan pengalaman historis membentuk opini publik di negara B berkaitan dengan kebijakan luar negeri negara A (model sosialisasi), dan 3. tekanan luar negeri dari negara A membentuk opini publik di negara B mengenai kebijakan luar negeri negara A (model pengaruh).

Variabel dependen dari kepentingan puncak AS adalah opini publik global terhadap kebijakan luar negerinya, namun diakui bahwa tidak ada satu variabel tunggal yang dapat mengukur konsep ini secara valid. Dalam studi ini Goldsmith berfokus pada kebijakan luar negeri AS selama suatu periode krisis tertentu dan menggunakan jawaban dari empat pertanyaan survei mengenai bagaimana dukungan eksplisit terhadap suatu kebijakan spesifik atau general Amerika Serikat dalam sebuah krisis. Pertanyaan-pertanyaannya adalah apakah seseorang setuju dengan aksi militer AS di Afghanistan, apakah negara responden seharusnya turut berpartisipasi dalam aksi militer AS terhadap Afghanistan, aspek mana yang paling menjadi perhatian dari perang tersebut, dan apakah mereka khawatir bahwa serangan terhadap Afghanistan ini akan diperluas menjadi perang terhadap Islam. Model kedua dari opini publik global memperlihatkan bahwa kepercayaan dan nilai yang disosialisasikan serta ekspektasi memiliki pengaruh. Untuk menguji hal ini, dimasukkan variabel pengukuran pengalaman sejarah jangka panjang dan pendek, serta faktor-faktor sosial dan politik mendasar. Salah satu jenis pengalaman yang khususnya relevan dengan perang yang dipimpin oleh AS ke Afghanistan adalah pengalaman terbaru negara tersebut dengan aksi terorisme. Di sini digunakan indikator

---

<sup>106</sup> Op.cit., hlm.4.

jumlah total aksi terorisme internasional pada 2001. Selain variabel terkait pengalaman sejarah terbaru ini, dipertimbangkan pula faktor-faktor yang lebih fundamental terkait dengan identitas politik dan kultur politik. Pertama, Inglehart (1990, 291, 295-8) menyatakan bahwa posmaterialisme berkaitan dengan menurunnya penekanan pada keamanan militer (*military security*). Karena meningkatnya kekayaan amat berkorelasi dengan “nilai-nilai posmaterialis” semacam itu (Abramson dan Inglehart 1995; Inglehart 1990, Inglehart dan Baker 2000), diperkirakan bahwa semakin tinggi nilai kekayaan di suatu negara, yang diukur dari PDB per kapita, semakin berkurang. Kedua, Goldsmith juga mempertimbangkan derajat demokrasi, mengingat sesuai dengan teori perdamaian liberal Kant, diperkirakan bahwa sesama negara demokrasi memiliki kemungkinan yang lebih rendah melihat tindakan yang dilakukan demokrasi lain sebagai suatu ancaman dan lebih mungkin untuk menganggapnya sebagai sebuah tindakan yang sah (*legitimate*). Oleh karena itu, responden di negara-negara dengan tingkat demokrasi yang lebih tinggi diperkirakan lebih mungkin mendukung tindakan militer AS terhadap Afghanistan. Beberapa bukti survei memperlihatkan bahwa masyarakat di negara-negara demokratis memandang negara-negara demokratis lain sebagai rekan yang dapat dipercaya (Russett 1993, 129-30). Akhirnya, karena rezim Taliban Afghanistan dan organisasi Al-Qaeda sama-sama mengklaim sebagai pembela Islam, diperkirakan bahwa perang melawan mereka akan mendapatkan tingkat persetujuan yang lebih rendah dari kalangan umat Islam dibandingkan dari umat kepercayaan lain (Atran 2003; Haddad and Khashan 2002). Untuk mengoperasionalkan hipotesis ini, dimasukkan persentase dari populasi Muslim.

107

Goldsmith juga berhipotesis bahwa faktor-faktor mendasar yang terkait dengan kultur politik akan memiliki efek. Baik nilai-nilai *post-material* yang diukur dengan PDB per kapita maupun demokrasi sama-sama tidak terkait secara signifikan dengan persetujuan/ketidaksetujuan terhadap perang tersebut. Namun demikian, variabel-variabel ini ternyata terlihat relevan dengan tingkat kepercayaan dalam upaya perang melawan teror yang dilancarkan oleh AS. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat di negara-negara yang lebih kaya memiliki kekhawatiran lebih rendah terhadap munculnya perang terhadap Islam, dan tingkat demokrasi yang lebih tinggi secara signifikan berkaitan

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm.11.

dengan rendahnya tingkat kepedulian mengenai pengeboman rakyat sipil di Afghanistan. Selain itu, ditemukan bahwa tipe rezim adalah satu-satunya prediktor signifikan dari tingkat kepedulian atas pengeboman terhadap masyarakat sipil, yang mengarahkan kita pada suatu (*credence*) bahwa masyarakat demokratis cenderung untuk mempercayai kebijakan luar negeri negara demokratis lain daripada masyarakat dengan sistem yang berbeda.

Dalam penelitian yang sama terlihat dampak signifikan mengenai persetujuan/ketidaksetujuan terhadap perang dalam arah yang telah diprediksi pada persentase Muslim, dengan Albania sebagai pengecualian. Masyarakat dengan komposisi Muslim lebih besar cenderung lebih banyak tidak setuju dengan perang tersebut. Dampak dari jawaban terhadap pertanyaan mengenai pengiriman pasukan dari negara yang bersangkutan untuk mendukung perang tersebut tidak mencapai tingkat signifikansi yang sama, namun arah dari dampak tersebut adalah sama, dan arah dampak terkait dengan kepedulian terhadap perang melawan teror yang kemudian dianggap berubah sebagai perang melawan Islam juga menandakan bahwa masyarakat dengan populasi Muslim yang besar menunjukkan kepedulian lebih besar terhadap isu tersebut, meskipun dampaknya tidak mencapai signifikansi statistik. Tanda negatif dari koefisien untuk tingkat kepedulian atas pengeboman terhadap rakyat sipil agak membingungkan, namun insignifikansi dari dampak tersebut tidak memungkinkan dibuatnya suatu kesimpulan yang kuat. Secara keseluruhan, seluruh hasil yang didapatkan tersebut konsisten dengan kebijaksanaan (pandangan) konvensional selama ini.<sup>108</sup>

### **III.2. Aspek Identitas Agama-Kultural dalam Hubungan Internasional/Pembuatan Kebijakan Luar Negeri**

Roy Jones mengingatkan bahwa pembuatan kebijakan luar negeri memiliki kemungkinan yang sama besarnya untuk salah sebagaimana berbagai perilaku manusia lainnya: 'Pembuatan kebijakan luar negeri tidak pernah bebas dari kekacauan, kekeliruan informasi, dari benturan perorangan, dari seluruh kelemahan manusia dalam seluruh penampakan sosialnya.<sup>109</sup> Bias-bias dalam berbagai hal dapat terjadi, termasuk dalam

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm.18.

<sup>109</sup> Jensen, L., *Explaining Foreign Policy*, (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1982), hlm.74.



segi kultural maupun ideologis. Salah satu kemungkinan terburuknya adalah perspektif ideologis dan kultural dapat menghasilkan generalisasi sederhana dalam pembuatan kebijakan luar negeri, yakni hitam-putih 'kebaikan' melawan 'keburukan', walau terdapat pula cara-cara lain yang lebih tak kasat mata di mana bias dapat mempenetrasi analisis.<sup>110</sup> Lebih lanjut, Clarke juga menyatakan bahwa sistem pengambilan kebijakan luar negeri, sebagaimana sistem lainnya, tidaklah beroperasi dalam ruang hampa. Perilaku atau 'output' dari sistem tersebut terkondisikan oleh pengaruh-pengaruh yang beroperasi di luar batas sistem tersebut, namun yang dapat serta benar-benar berfungsi sebagai pemberi 'input' yang signifikan ke dalam sistem pengambilan kebijakan luar negeri tersebut.<sup>111</sup>

Dalam perspektif kultural, pembuatan sebuah strategi politis untuk memerangi teror harus dimulai dengan pemahaman terhadap nilai-nilai dan kepercayaan teroris terlebih dahulu. Apa yang memotivasi mereka? Nilai-nilai apa yang mereka gunakan sebagai justifikasi tindakan mereka? Mengingat seluruh pembajak 11 September berasal dari negara-negara Islam, dan seluruhnya terlihat mengekspresikan motivasi religius, pendekatan kultural akan menyatakan bahwa terdapat sesuatu yang inheren dalam nilai-nilai dan kepercayaan Islam yang memberikan justifikasi sosial untuk teror. Misalnya, beberapa pengamat menyatakan bahwa karena Quran menawarkan panduan "yang begitu detil dalam kehidupan sehari-hari (*for even the minutae of everyday life*), budaya Islam mengalami kesulitan besar berurusan dengan perubahan dan kurang memiliki "tradisi otokritik. Sebagai akibatnya, beberapa analis memandang bahwa Muslim cenderung bersikap "defensif dan in-secure", serta sering menyalahkan suatu hal buruk apapun yang terjadi pada suatu "kekuatan asing yang jahat."<sup>112</sup>

Menurut Michael Mousseau, Islam sendiri tidak bertanggung jawab atas dukungan sosial terhadap teror. Patron-patron yang takut kehilangan hak/status istimewanya dalam masyarakat seperti Osama bin Laden menemukan bahwa ideologi anti pasar amat ampuh dalam menjaring pengikut. Mereka memanipulasi Islam untuk mencapai tujuan mereka sendiri, sebagaimana yang terjadi pada bangsa Eropa ratusan tahun lalu yang menggunakan Kristen sebagai justifikasi atas teror dan pembantaian

---

<sup>110</sup> Michael Clarke & Brian White (Ed.), *Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy Systems Approach*, (Hants: Edward Elgar Publishing Limited, 1989), hlm. 9.

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>112</sup> Michael Mousseau, Market Civilization and Its Clash with Terror, *International Security*, Vol.27, No.3, MIT Press, hlm. 5.

massal. Fakta menunjukkan bahwa sebaliknya, Islam muncul di Mekkah, pusat perdagangan Mediterania dan Asia Selatan pada abad ke tujuh, dan Quran menekankan nilai-nilai pasar dari universalisme, kesetaraan, pertukaran kontraktual (*contractual exchange*), dan toleransi hingga derajat tertentu terhadap pihak luar (non-Muslim). Ekonomi pasar di wilayah ini kemudian pupus sebelum norma-norma pasar –dan budaya liberal- intensified dan meluas di seluruh dunia Islam, namun karakteristik awal Islam yang liberal memperlihatkan bahwa agama dapat diinterpretasikan, dan dimanipulasi, untuk memenuhi tujuan seseorang.<sup>113</sup>

Terorisme memiliki penyebab permukaan dan mendasar. Apa yang dimaksud dengan penyebab permukaan adalah penyebab yang dinyatakan secara ekspresif oleh para teroris itu sendiri. Analisis Emik, di mana subjek diminta untuk menjelaskan mengapa mereka berperilaku sebagaimana yang mereka lakukan, memperlihatkan penyebab permukaan. Namun hal itu tidak menjelaskan mengapa beberapa aksi atau tindakan dapat memprovokasi sentimen keagamaan, sementara yang lain justru terabaikan. Misalnya, ratusan orang tewas dalam kekerasan yang baru-baru ini terjadi antara umat Hindu dan Muslim di India, dengan cukup banyak korban di pihak umat Islam. Namun pembantaian ini tidak menciptakan suatu “berita yang menyentuh emosi di media-media Arab”. Adalah hal yang berbeda ketika tentara Israel membunuh Muslim, sebagaimana yang sering terjadi sepanjang beberapa dekade terakhir; dunia Islam bergolak karenanya. Salah satu contohnya adalah mengapa begitu banyak orang Indonesia yang berempati dengan penderitaan dan perjuangan rakyat Palestina, namun terkesan tidak memberikan reaksi yang sama terhadap terbunuhnya Muslim-muslim di India? Alasannya adalah pengidentifikasian Israel dengan Amerika Serikat dan pasar yang tengah berkembang. Meskipun identifikasi yang berkaitan dengan Islam bisa jadi menjadi sebab permukaan dari kemarahan ini, penyebab mendasarnya bukanlah Islam itu sendiri, namun sikap inheren anti-pasar, dan dengan demikian juga berarti anti-Amerika- suatu kemarahan yang telah tersebar luas bahkan melampaui batas dunia Islam dan yang asalnya tidak pernah dipahami bahkan oleh mereka yang begitu membenci Barat.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm 17.

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm 19.

Kemarahan terhadap AS sebagai simbol kedigdayaan Barat begitu inheren dalam beberapa masyarakat sehingga banyak dari mereka yang akan menginterpretasikan apapun yang dilakukan AS menyimpan niat jahat. Jika AS menawarkan untuk meningkatkan bantuan ekonomi, ia akan dipandang sebagai imperialis, dan jika sebaliknya, maka AS akan dianggap tidak memiliki kepedulian. Jika AS melakukan intervensi untuk melindungi Muslim, sebagaimana yang dilakukannya pada konflik Kosovo 1999, akan bermunculan kritik yang menyerang AS melakukannya karena kepentingan imperialisme (untuk mencari minyak di wilayah tersebut, dsb.), atau paling tidak menuduh bahwa AS secara sengaja mengulur-ulur intervensi tersebut karena Amerika memang begitu membenci umat Islam.<sup>115</sup>

Meningkatnya konflik etnis menyebabkan banyaknya penelitian yang dilakukan atas isu tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Gurr (1993a, 1993b, 2000), antara lain, dan juga menstimulasi penerbitan banyak jurnal baru di bidang yang sama, termasuk *Nationalism and Ethnic Conflict*, *Nations and Nationalism*, dan *Ethnicities*. Serupa dengan hal itu, argumen yang menyatakan bahwa agama tidak lagi relevan dalam politik semakin sedikit memperoleh dukungan. Amat mungkin kejadian yang merupakan pembantahan langsung terhadap pandangan tersebut adalah revolusi Iran yang terjadi pada 1979, yang dengan jelas memperlihatkan bahwa agama masih merupakan suatu kekuatan politik vital setidaknya di beberapa bagian dunia. Sejak itu, berbagai konflik dan kejadian lain di seluruh dunia semakin memperkuat pandangan bahwa agama terus memiliki pengaruh dalam politik. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada konflik di Afghanistan, Sri Lanka, Timor Timur, Kashmir, serta beberapa negara di Timur Tengah, bangkitnya fundamentalisme agama sebagai kekuatan politik, serta tentu saja serangan 11 September 2001 terhadap AS.<sup>116</sup>

Ironisnya, banyak dari mereka yang berpendapat bahwa agama terus memainkan peranan dalam masyarakat dan politik menyatakan bahwa alih-alih menyebabkan keruntuhan agama, modernitas justru berkontribusi pada kebangkitannya kembali. Dengan kata lain, agama mengalami suatu kebangkitan atau revitalisasi diakibatkan sejumlah faktor yang inheren dalam modernitas. Pertama, di banyak bagian Dunia

---

<sup>115</sup> *Op.cit.* 20.

<sup>116</sup> Jonathan Fox, Religion and State Failure: An Examination of the Extent and Magnitude of Religious Conflict from 1950 to 1996, *International Political Science Review*, Jan.2004, hlm.3.

Ketiga, upaya-upaya untuk melakukan modernisasi telah gagal menyebabkan pudarnya agama melawan ideologi sekular Barat yang merupakan basis bagi pemerintahan yang bertanggung jawab atas upaya modernisasi tersebut (Juergensmeyer, 1993; Thomas, 2000: 817-9). Kedua, modernisasi telah mengabaikan gaya hidup tradisional, nilai-nilai masyarakat, juga moral yang sebagian didasarkan pada agama, dan karenanya menyebabkan backlash religius terhadap modernitas (Sahliyeh, 1990: 9; Haynes, 1994: 34; Thomas, 2000: 816). Ketiga, modernisasi telah memberikan kesempatan bagi negara dan institusi religius untuk meningkatkan ruang pengaruh mereka masing-masing, yang pada gilirannya justru menghasilkan lebih banyak benturan di antara keduanya (Shupe, 1990:23-6). Keempat, sistem politik modern memungkinkan partisipasi massa dalam politik, yang juga memungkinkan sektor masyarakat yang religius memiliki jalan untuk menerapkan pandangan mereka terhadap yang lainnya (Rubin, 1994: 22-3). Kelima, piranti komunikasi modern telah memungkinkan kelompok-kelompok keagamaan untuk “mengekspor” pandangan mereka lebih mudah dan media internasional telah membuat kelompok-kelompok religius tersebut menyadari keberadaan kelompok religius lainnya, yang seringkali memberikan inspirasi untuk melakukan tindakan yang serupa (Shupe, 1990: 22). Keenam, sebuah trend baru dalam sosiologi agama, yang dikenal dengan nama *rational choice* atau teori ekonomi keagamaan, menyatakan bahwa kebebasan yang terdapat dalam banyak masyarakat modern untuk memilih agamanya sendiri telah menyebabkan peningkatan dalam religiusitas. (Iannaccone, 1995a, 1995b). Ketujuh, di banyak tempat di Dunia Ketiga, disebabkan proses kolonialisme dan kolonialisme kultural, ide-ide sekular Barat telah dianggap asing, dan karenanya, tidak sah (*illegitimate*) (Juergensmeyer, 1993). Kedelapan, organisasi-organisasi religius modern juga berkontribusi dalam kegiatan politis. Pada level general, beberapa bentuk organisasi diperlukan untuk mobilisasi politik. Institusi-institusi keagamaan menyediakan organisasi yang siap untuk menjalankan tujuan ini, yang seringkali memiliki akses terhadap media, aset ekonomi yang cukup besar, serta jejaring komunikasi internasional. Bahkan fakta menunjukkan bahwa di banyak rezim non-demokratis, status institus keagamaan yang dilindungi membuatnya menjadi satu-satunya bentuk organisasi yang dapat dibentuk oleh rakyat awam. Orang-orang yang aktif dalam organisasi keagamaan cenderung mengembangkan kemampuan organisasi dan kepemimpinan yang pada gilirannya juga

berguna untuk kegiatan-kegiatan politik. Mereka seringkali terekspos pada upaya-upaya mobilisasi yang dijalankan oleh organisasi keagamaan mereka dan juga pesan-pesan politik dan moralitas (yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dari pesan politik). Organisasi religius juga membantu mengembangkan jejaring interpersonal yang berguna untuk mobilisasi politik. Bagaimanapun, patut diingat bahwa dalam banyak kasus terbukti organisasi religius seringkali bersifat konservatif dan cenderung mendukung status-quo (Fox, 1999a; Hadden, 1987a; Harris, 1994; Johnston and Figa, 1988; Verba et al., 1993).<sup>117</sup>

Banyak pula yang berpendapat bahwa agama berkontribusi menciptakan konflik pada era modern. Banyak yang menyatakan bahwa agama dapat menyediakan legitimasi terhadap baik pemerintah sekaligus pihak yang menentangnya (Lewy, 1974: 550-1; Gill, 1998; Lincoln, 1985). Salah satu contoh dari hal ini adalah teologi pembebasan (liberation theology), sebuah kombinasi dari teologi Katolik dan Marxisme, yang telah berkontribusi memicu perlawanan terhadap pemerintahan-pemerintahan di Amerika Latin (Berryman, 1987; Dodson, 1986; Roelofs, 1988). Agama seringkali digunakan sebagai justifikasi bagi terorisme (Drake, 1998; Juergensmeyer, 1997; Hoffman, 1995; Martin, 1989; Rapoport, 1984). Banyak yang berpandangan bahwa kekerasan adalah elemen intrinsik dari suatu agama (Juergensmeyer, 1991; Rapport, 1991; Girard, 1977; Zitrin, 1998). Apakah hal ini benar atau tidak, adalah jelas bahwa banyak kelompok religius memandang diri mereka dalam peperangan dengan beragam musuh, baik dari kaum sekular maupun agama lain. Persepsi “berada dalam perang” ini amat krusial untuk menjelaskan terjadinya kekerasan religius, karena “jika dunia dipahami sebagai tempat yang damai, tindakan kekerasan akan dipandang sebagai terorisme, sementara jika dunia dipahami berada dalam kondisi perang, maka tindakan kekerasan menjadi sah” (Laustsen and Waever, 2000: 725). Beberapa juga memandang bahwa agama berkontribusi menciptakan diskriminasi (Little, 1991, 1996a, 1996b; Fox, 2000b), konflik etnis (Fox, 1999c, 2000c, 2000d), konflik internasional (Henderson, 1997), intervensi internasional (Fox, 2001c), resolusi konflik (Abu-Nimer, 2001; Gopin, 2000; Weigel, 1992), hingga pembersihan etnis/genosida (Fein, 1990: 49). Konflik keagamaan juga cenderung menjadi lebih rentan disebabkan sifat tidak tawar-menawar Wentx (1987) menyebut

---

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm.3-4.

fenomena ini sebagai “dinding agama.” Masyarakat membangun dinding di sekitar sistem kepercayaan mereka dan mempertahankannya dengan segala cara. Ini disebabkan karena agama berkaitan erat dengan posisi seseorang di dunia dan cara menafsirkan dunia secara bermakna, dan adalah hal yang sulit untuk mengeosiasikan isu-isu yang masuk ke dalam kategori ini dengan siapapun yang memiliki afiliasi dengan suatu bentuk keagamaan.. Laustsen dan Waever (2000: 719) secara serupa berpandangan bahwa “agama berurusan dengan hal-hal semacam ini. Dengan demikian, seseorang tidak dapat bersikap pragmatis berkaitan dengan tantangan semacam ini.” Dengan demikian, jika suatu entitas lawan dikendalikan oleh keyakinan dan bukan keinginan meraih kekuasaan semata, maka dapat dipastikan akan lebih sulit untuk berurusan dengannya karena keyakinan adalah sesuatu yang tidak dengan mudah dapat dikompromikan. Hal ini akan terbukti jauh lebih benar jika kedua pihak sama-sama dikendalikan oleh keyakinan. Adalah penting untuk mencatat bahwa tipe-tipe lain motivasi, khususnya motivasi yang bersifat kebangsaan dan etnis, juga dapat menyebabkan *intractability* yang serupa (Carment dan James, 1998: 68).<sup>118</sup>

Yang membuat ini penting untuk dibahas adalah memperkaya perspektif dalam analisis kebijakan luar negeri AS. Identitas, khususnya dalam bentuk religi dan budaya, memang tidak bersifat determinan, namun merupakan faktor yang memiliki signifikansinya tersendiri.

Secara keseluruhan, bukti-bukti yang ada dengan jelas memperlihatkan bahwa banyak konflik yang terjadi bersifat religius. Sejak 1950, jumlah konflik religius maupun non-religius terus meningkat, meskipun konflik antar-agama peningkatannya tidak sepesat yang pertama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun agama masih menjadi faktor penting dalam konflik, telah jelas bahwa faktor-faktor lain, atau setidaknya kombinasi dari berbagai faktor lain, juga penting. Salah satu faktor yang terlihat telah mempengaruhi meningkatnya konflik-konflik non-religius adalah Perang Dingin. Selama Perang Dingin, konflik-konflik non-religius menjadi lebih umum daripada konflik religius, namun setelah Perang Dingin berakhir seluruh konflik mengalami penurunan, dengan konflik non-religius menurun jauh lebih pesat dibandingkan dengan konflik

---

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm.5.

religius. Jika kecenderungan ini berlanjut, konflik religius akan menjadi sama umumnya dengan jenis konflik lainnya. Bagaimanapun, jelas terlihat bahwa konflik religius masih memiliki persentase yang signifikan dari seluruh konflik lainnya. Serupa dengan hal itu, secara keseluruhan konflik religius cenderung lebih intens dibandingkan dengan konflik non-religius. Hal ini khususnya terbukti benar dalam perang-perang revolusioner, namun Hal ini khususnya menarik mengingat fakta bahwa konflik etnislah yang paling mungkin bersifat religius, dan perang revolusioner adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk menjadi religius. Dengan fakta ini, dapat dikatakan bahwa agama lebih mungkin terlibat dalam perang etnis, namun perang revolusioner yang religius dapat terjadi secara lebih intens. Hal ini juga menunjukkan bahwa peperangan antara agama yang berbeda jauh lebih sering terjadi dibandingkan dengan tantangan yang dilontarkan kaum fundamentalis terhadap pemerintahan sekuler.<sup>119</sup>

Faktor religius yang juga turut membentuk dukungan untuk **menginvasi Afghanistan dan Irak adalah pandangan bahwa Islam adalah agama kekerasan.** Dampak penting dari agama dalam isu semacam itu bahkan tampak jelas dalam analisis multivariat, di mana variabel keagamaan cenderung untuk menyaingi variabel politik dan biasanya melampaui variabel sosio-demografis dalam menjelaskan perbedaan-perbedaan dalam isu-isu semacam itu.<sup>120</sup>

### **III.3. Pengaruh Faktor Agama/Identitas dalam Proses Pengambilan Kebijakan Luar Negeri AS**

Terdapat pula berbagai teori yang menyatakan bahwa **agama mungkin juga memainkan peran penting dalam membentuk opini publik terkait dengan kebijakan luar negeri AS.** Pertama, agama tercatat telah memainkan peranan seperti itu dalam sejarah, di mana agama berfungsi untuk membantu pembentukan sikap masyarakat AS pada umumnya terhadap kebijakan luar negeri hingga sebelum runtuhnya Tembok Berlin. Adalah keliru jika Amerika Serikat dianggap tidak memiliki keterkaitan dengan agama, walaupun secara *de facto* dan *de jure* negeri itu adalah negeri sekuler. Sebagaimana Tocqueville katakan, “Di Amerika Serikat, agama bercampur aduk dengan

---

<sup>119</sup> *Ibid.* Hlm.15-17

<sup>120</sup> Corwin E. Smidt. *Sociology of Religion*. Vol.66, No.3, *Association for the Sociology of Religion, Inc.*, hlm. 2.

seluruh kebiasaan yang mungkin ditemukan dalam sebuah bangsa serta pada perasaan patriotisme sekaligus, di mana agama menurunkan suatu kekuatan pendorong terhadapnya.”<sup>121</sup>

Selama masa Perang Dingin, “atheisme” dari perspektif ideologi Marxis berfungsi mendorong sentimen anti komunis di antara banyak masyarakat Amerika yang konservatif. Sebagai akibatnya, mereka yang memperlihatkan tingkat komitmen religius yang lebih tinggi serta mereka yang menyatakan diri sebagai “fundamentalis” doktrin keagamaan menghasilkan sikap anti-Soviet yang lebih kuat dan lebih mendukung pengeluaran yang besar di bidang pertahanan (Guth dan Green 1993| Wittkopfl 990:43-44; Hurwitz, Peffley dan Seligson 1993). Selain itu, selama tahun-tahun awal Perang Dingin, sikap keagamaan di kalangan Katolik Amerika terlihat turut berkontribusi terhadap tumbuhnya sikap anti-komunis, walaupun kemudian sikap itu menjadi berbalik selama tahun 1980-an menyusul penerbitan surat uskup Katolik mengenai isu perang nuklir (Wald 1992).

Kedua, bahkan dengan runtuhnya Uni Soviet, dapat terlihat bahwa agama masih terus berfungsi sebagai variabel penting yang turut membentuk sikap terhadap kebijakan luar negeri secara umum dan terhadap Timur Tengah secara khusus. Hal ini bisa jadi benar, misalnya, jika sikap masyarakat Amerika terhadap kebijakan luar negeri lebih berakar pada perspektif ideologi atau politik partisan. Dalam sejarahnya, isu terkait kebijakan luar negeri dipandang sebagai hal yang tidak terlalu mengundang perpecahan secara politis dibandingkan dengan hal-hal terkait kebijakan domestik, karena rakyat Amerika pada umumnya lebih bersatu dalam berurusan dengan “kepentingan nasional bersama” dalam konteks politik internasional. Bagaimanapun, sebagaimana yang tampak pada pemilihan presiden, sikap terhadap kebijakan luar negeri dapat dengan mudah dihubungkan dengan politik partisan. Dan, jika posisi terhadap kebijakan luar negeri tidak lain hanyalah sebuah fungsi dari suatu orientasi ideologis atau afiliasi partisan, dengan demikian agama juga dapat terkait dengan sikap terhadap kebijakan luar negeri, khususnya karena afiliasi religius dan faktor religius lainnya terhubung dengan klasifikasi diri ideologis dan partisan Amerika kontemporer (Kohut, Green, Teeter, and

---

<sup>121</sup> Samuel P. Huntington, *Who Are We? The Challenges to America's National Identity*, ( New York: Simon & Schuster, 2004), hlm. 102.



Toth, 2000:59-77). Dengan demikian, dampak agama terhadap sikap terhadap kebijakan luar negeri dapat menjadi sangat penting, bahkan jika hal tersebut dimediasi melalui dampak substansial terhadap orientasi ideologis dan partisan.<sup>122</sup>

Ketiga, melampaui kemungkinan dampak tidak langsung seperti itu, terdapat alasan untuk mengantisipasi bahwa agama dapat secara langsung membentuk sikap terhadap kebijakan luar negeri. Terutama sekali, terdapat faktor-faktor kultural atau teologis yang bagi beberapa kelompok religius dapat membentuk sikap terhadap kebijakan Timur Tengah. Tidaklah mengejutkan bahwa Yahudi khususnya amat mendukung bantuan Amerika terhadap Israel (Greenber dan Wald 2001). Namun basis religius dari dukungan Israel ini tidak terbatas pada segmen Yahudi dari elektorat di AS. Protestan evangelis di AS, khususnya mereka yang memegang erat perspektif teologi dispensasi, telah lama menjadi pendukung hubungan yang erat antara AS dan Israel (Guth et al 1996; Weber 2004). Akibatnya, dapat dilihat bahwa adalah Yahudi dan Protestan evangelis yang merupakan yang paling bersemangat di kalangan rakyat AS untuk menggulingkan Saddam Hussein, mendukung invasi ke Irak, dan memandang Islam sebagai agama yang relatif identik dengan kekerasan.<sup>123</sup>

Akhirnya, hampir dua pertiga (62 persen) masyarakat AS yang menyebut diri mereka “sangat konservatif” memandang Islam sebagai agama yang mendorong kekerasan lebih banyak daripada agama lainnya, sementara hanya 27 persen mereka yang menyebut diri “sangat liberal” memiliki pandangan yang sama. Perbedaan di antara partai tidak sebesar perbedaan terkait ideologi, khususnya diperlihatkan pada fakta bahwa separuh kaum Republikan (50 persen) dan sepertiga (32 persen) Demokrat menyatakan bahwa Islam menganjurkan kekerasan lebih daripada agama lainnya.<sup>124</sup>

Selain itu, dalam penelitian yang sama terlihat pula bahwa tradisi religius merupakan faktor terpenting yang menentukan beragamnya opini mengenai Islam. Yahudi dan Protestan Evangelis mencapai nilai tertinggi, merepresentasikan tendensi yang lebih besar untuk memandang Islam sebagai agama yang mendorong kekerasan

---

<sup>122</sup> *Op.cit.*, hlm. 3-4.

<sup>123</sup> *Ibid.* Hlm. 8

<sup>124</sup> *Ibid.* Hlm. 12

lebih besar daripada agama lain, sementara kaum sekular justru memperlihatkan kecenderungan yang lebih kecil terhadap isu yang sama.<sup>125</sup>

Melihat kenyataan tersebut, bahwa banyak masyarakat Amerika yang memperlihatkan komitmen keagamaan yang relatif kuat, dapat disimpulkan bahwa tidak ada wilayah kebijakan yang benar-benar terlindung dari pengaruh keagamaan/religi.<sup>126</sup>

Menurut seorang ilmuwan Prancis, Maxime Rodinson, “Kristen Barat telah lama memandang dunia Muslim sebagai ancaman, jauh sebelum akhirnya Islam benar-benar menjadi masalah aktual.” Pandangan serupa juga diserukan oleh ahli sejarah kebangsaan Inggris Albert Hourani, yang menyatakan bahwa “Islam sejak kemunculannya telah menjadi masalah bagi Kristen Barat.”<sup>127</sup>

Tidak seperti Eropa, AS tidak memiliki pengalaman sejarah yang panjang yang berdarah dengan negara-negara dan masyarakat Muslim. Negara ini tidak pernah secara langsung diperintah oleh bangsa Arab atau bangsa Muslim lainnya. Pada awal abad ke-20, AS yang tidak dikerangkeng oleh kebutuhan kolonial dan geografis, menjalankan hubungan yang hangat dan dinamis dengan bangsa-bangsa Arab dan Muslim, yang memandang AS sebagai bagian dari bangsa Eropa yang progresif. Bahkan setelah AS menjadi negara adidaya, negara ini masih jauh lebih sedikit terikat dengan faktor-faktor kolonial, sejarah maupun kultural dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Kendali politik dan ekonomi merupakan dasar pertimbangan pengambilan kebijakan luar negeri Washington terhadap Timur Dekat dan negara Islam lainnya. Lebih lanjut, berbeda dengan Eropa, masyarakat Amerika tidak terlalu peduli dengan kehadiran sejumlah besar imigran Muslim di tengah-tengah mereka, dan justru memandang masyarakat Hispanik sebagai “ancaman asimilasi yang sesungguhnya.” Meskipun tantangan religius dan intelektual dari Islam terus memenuhi imajinasi banyak orang di Amerika Serikat, adalah dampak keamanan dan strategis dari politik massa Islam-lah yang sesungguhnya menjadi bahan pemikiran serius AS.<sup>128</sup>

Selama masa Perang Dingin, kebijakan luar negeri AS dikendalikan oleh pertimbangan dan kalkulasi strategis untuk menghadapi Perang Dingin, bukan oleh

---

<sup>125</sup> *Ibid.* Hlm. 18

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> Fawaz A. Gerges, *Islam and Muslims in the Mind of America: Influences on the Making of U.S. Policy*, *Journal of Palestine Studies*, Vol.26, No.2 (Winter, 1997), University of California Press, hlm.2.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm.3.

sejarah, kultur ataupun ketakutan atau kebencian intrinsik lainnya terhadap Islam. Namun demikian, persepsi AS mengalami perubahan radikal pada tahun 1970-an, khususnya disebabkan oleh meletupnya gerakan politik Islam dalam konstelasi politik besar. Peristiwa-peristiwa regional, seperti Perang Arab-Israel 1973, yang diikuti oleh embargo minyak oleh negara-negara Arab, serta revolusi Iran 1978-1979 serta krisis penyanderaan diplomat-diplomat AS di kedutaan AS di Teheran mengejutkan para pejabat negara tersebut dan segera membuat mereka mulai memandang Islam sebagai ancaman bagi kepentingan Barat.<sup>129</sup> Dari seluruh perkembangan regional dalam dekade 1970-an, revolusi Iran dan krisis penyanderaan adalah dua peristiwa yang paling memberikan efek penentu bagi pembuatan kebijakan luar negeri AS serta pandangan publik terhadap Islam. Masyarakat Amerika yang terbiasa menganggap negara mereka sebagai negara paling demokratis dan murah hati terkejut mendengar pernyataan Ayatollah Khomeini yang memanggilnya “Sang Setan Besar/*the Great Satan*.” Seorang pejabat AS mengatakan, “pengalaman Iran tersebut mengkondisikan secara ekstrim pemikiran AS tentang sifat alami fundamentalis Islam yang penuh kekerasan dan anti-Amerika. Pemerintah Amerika sebelumnya tidak pernah mengalami konfrontasi semacam ini, yang dipandang sebagai sesuatu yang tanpa kompromi dan “irasional.” Presiden Carter bahkan menggambarkan bahwa negosiasi yang ia lakukan dengan para mullah Iran bagaikan “berurusan dengan sekelompok orang gila.”<sup>130</sup>

Peristiwa-peristiwa yang kemudian terjadi di tahun-tahun berikutnya hanya semakin mempertajam ketakutan AS terhadap kekuatan dari gerakan Islam militan. Pada akhir tahun 1979, Arab Saudi, rekanan AS yang paling penting di Timur Tengah, digoncang oleh pembajakan dan penyanderaan Mesjidil Haram di Makkah selama dua minggu oleh anggota pergerakan Islam yang menolak monopoli keluarga kerajaan Saudi dalam kekuasaan politik dan ekonomi. Pembunuhan Presiden Anwar Sadat dari Mesir pada tahun 1981 serta serangan berdarah terhadap personel AS dan instalasinya di Lebanon, Kuwait dan di beberapa tempat lainnya semakin meningkatkan kekhawatiran para petinggi AS terhadap penyebaran “fundamentalisme” Iran tersebut.”<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm.4.

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> *Ibid.*

Menurut Profesor Richard Bullet dari Columbia University, rakyat Amerika secara umum menerima pemahaman bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang Muslim merupakan “representasi dari budaya fanatik dan teroristik yang tidak dapat ditoleransi ataupun diajak berdialog.”<sup>132</sup>

Dalam dua survei mengenai sikap masyarakat AS terhadap Islam segera setelah pengeboman 11 September, lebih dari 50 persen responden menyatakan bahwa “Muslim sangat anti-Barat dan anti-Amerika.” Selain itu, dari berbagai kelompok religius yang terdaftar sebagai yang paling tidak disukai oleh responden, peringkat pertama diduduki oleh Muslim.<sup>133</sup>

Bagaimanapun, banyak pejabat AS yang menolak adanya hubungan antara pencitraan negatif Islam dengan kebijakan luar negeri AS. Asisten Sekretaris Negara Robert Pelletreau, misalnya, amat tajam mengkritisi media yang kerap kali justru mendorong kecenderungan dalam ranah akademik maupun publik untuk menyamakan Islam dengan fundamentalisme dan ekstrimisme Islam. Namun ia tidak mempertimbangkan dampak sorotan media terhadap Islam terhadap kebijakan luar negeri dan sebaliknya. Pembuat kebijakan AS lainnya, meskipun sepakat bahwa aliran informasi terjadi dalam berbagai level di antara institusi-institusi non-pemerintah dengan institusi pembuat kebijakan, menyatakan bahwa kesediaan para pembuat kebijakan AS untuk bertukar pandangan dengan media dan kalangan akademis bergantung pada situasi dan kebutuhan akan manajemen krisis. **Terdapat pandangan bahwa para petinggi AS mendasarkan kebijakan mereka dalam ikatan persepsi kepentingan nasional. Bagaimanapun, bagaimana mereka mendefinisikan kepentingan nasional amat terkait erat dengan persepsi mereka atas kenyataan, dan kebijakan tidak diformulasikan dalam ruang vakum/bebas nilai.** Peran Kongres, media, serta pertimbangan domestik turut mendorong dinamika politik serta mempengaruhi opini dalam komunitas pembuat kebijakan luar negeri, khususnya terhadap isu-isu yang terkait dengan konflik Arab-Israel serta Islam politik. Samuel Lewis, mantan direktur Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Dalam Negeri, sepakat bahwa sorotan negatif yang dilakukan media terhadap “kelompok Islam ekstrim” semakin memperkuat persepsi

---

<sup>132</sup> Fawaz A. Gerges., *Islam and Muslims in the Mind of America: Influences on the Making of U.S. Policy.*, *Journal of Palestine Studies*, Vol.26, No.2 (Winter, 1997), University of California Press, hlm.6.

<sup>133</sup> *Ibid.*

masyarakat Amerika terhadap Islam, dan dengan demikian semakin memperumit pekerjaan para pembuat kebijakan AS.<sup>134</sup>

#### **III.4. Peran Israel dan Sekutunya dalam Pendefinisian Citra Islam**

Sebagian besar pejabat AS khususnya di Departemen Dalam Negeri dan NSC (*National Security Agency*) menolak adanya hubungan khusus dengan Israel. Mereka menegaskan bahwa formulasi kebijakan luar negeri AS terhadap kaum Islamis didasarkan semata-mata pada pertimbangan kepentingan nasional. Namun demikian, terdapat beberapa suara yang berbeda. Salah seorang staf senior departemen yang sama, misalnya, menyatakan bahwa, “Kami sungguh amat dipengaruhi oleh definisi Israel terhadap Islamis. Dalam skala yang lebih besar, dapat dikatakan bahwa pandangan Israel terhadap fundamentalisme Islam membentuk persepsi para pejabat AS terhadap fenomena tersebut.”<sup>135</sup>

Salah satu pejabat dalam pemerintahan Clinton yang sempat diwawancarai bahkan mengutarakan kekhawatiran mereka terhadap atmosfer yang berkembang di Kongres. Salah seorang pejabat NSC menyatakan bahwa Kongres dan publik menggunakan pandangan yang “simplistik” dan penuh “prasangka” terhadap Islam dan kaum Muslim. Elaine Sciolino dari New York Times mengatakan, “dalam ketiadaan suatu ancaman yang nyata terhadap AS pasca komunisme, radikalisme Islam telah merasuk ke dalam imajinasi sebagian anggota Kongres. Dalam beberapa tinjauan yang dilakukan, sebagian anggota Kongres mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas ancaman yang akan timbul disebabkan oleh bangkitnya kembali Islam politik.”<sup>136</sup>

Selain dari cara pandang Kongres yang secara otomatis juga mempengaruhi pendekatan AS secara keseluruhan terhadap Islam politik, beberapa pejabat pemerintahan Clinton juga menyatakan secara tegas bahwa persepsi publik dan Kongres terhadap Islam pada akhirnya mempengaruhi dan menciptakan batasan-batasan dalam proses pembuatan kebijakan.<sup>137</sup>

---

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm.6.

<sup>135</sup> *Ibid*. hlm.9.

<sup>136</sup> *Ibid*.

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm.10.